

## Operasional Bus Wisata Transjakarta Gratis Berakhir

JAKARTA (IM) - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) resmi mengakhiri operasional Bus Wisata pada masa Libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah pada, Rabu (11/5) kemarin. Selama 10 hari beroperasi, tercatat sebanyak 56.811 pelanggan telah terlayani dengan baik.

"Kami berterimakasih atas antusias yang besar terhadap layanan Bus Wisata. Transjakarta berharap layanan yang kami hadirkan bisa memberi kenangan indah pada masa Libur Lebaran kemarin," ujar Kepala Departemen Komunikasi Korporasi dan CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Iwan Samariansyah, Kamis (12/5) dalam keterangan tertulis.

Iwan menambahkan, antusias yang besar ini berlanjut dengan permintaan masyarakat untuk meneruskan operasional layanan Bus Wisata.

Seperti diketahui, layanan bus wisata sebelumnya tidak

beroperasi sementara guna memutus rantai penyebaran covid-19 di sektor transportasi publik, khususnya Transjakarta.

"Kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu dari berbagai sisi. Mengingat Jakarta masih berada di masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), aspek protokol kesehatan (prokes) menjadi poin penting yang harus dikaji guna memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan," katanya.

Sebagai tambahan, Transjakarta mengoperasikan Bus Wisata pada 3-11 Mei lalu. Adapun layanan ini beroperasi mulai pukul 10.00-21.00 WIB dengan tarif Rp0 atau gratis.

Transjakarta menyediakan dua rute Bus Wisata yakni Jakarta Modern (BW2) dengan rute Juanda Istiqlal (PP) dan Pencakar Langit (BW4) dengan rute IRTI Monas (PP). ● yan

### PERBAIKI KUALITAS UDARA

## Pemprov DKI Siapkan Kendaraan Dinas Pakai Mobil Listrik

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mendorong perbaikan kualitas udara Jakarta. Salah satunya melalui program Langit Biru dengan penggunaan mobil listrik.

"Jadi kita ingin udara Jakarta bersih dan sehat, salah satunya nanti ke depan menggunakan mobil listrik, kita mulai dengan kendaraan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza), Kamis (12/5).

Di dunia, kata Ariza, salah satu sumbangsih terbesar polusi udara adalah melalui kendaraan.

"Asap knalpot kendaraan itu yang berkontribusi besar terhadap polusi udara," kata Ariza.

Sebagai bentuk realisasi program tersebut, Pemprov DKI telah meluncurkan 30 bus listrik Transjakarta. Ke

depan secara bertahap akan diperluas pada kendaraan dinas.

"Tidak hanya bus listrik tapi juga ke depan mudah-mudahan mobil-mobil dinas sampai dengan mobil masyarakat, mari kita semua masyarakat dukung program ini," bebernya.

Ariza menyebut mobil listrik memang jauh lebih mahal dibanding mobil biasa. Kendati demikian, hal itu seharusnya tidak masalah asalkan untuk kesehatan bersama.

"Tapi ini harga mahal yang harus kita bayar untuk kesehatan kita, udara bersih sehat itu untuk kesehatan kita. Apalagi kita tau sekarang ini di dunia ini sedang marak ada-ada saja wabah baru, virus baru, yang harus kita tangani bersama," tandasnya. ● yan

## Pemkot Jakpus akan Bangun 206 Tiang Lampu PJU

JAKARTA (IM) - Pemkot Jakarta Pusat akan membangun sebanyak 206 tiang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik. Pemasangan lampu PJU ini memenuhi permintaan warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Kepala Seksi Perencanaan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat, Ahmad Hidayatullah menuturkan, pemasangan tiang PJU akan dipusatkan di sejumlah jalan lingkungan dan jalan kolektor. "Tahun ini totalnya ada sebanyak 206 tiang PJU yang akan kita bangun," tutur Ahmad dalam laman jakarta.go.id, Kamis (12/5).

Dari total 206 tiang PJU, lanjut Ahmad, sebanyak 145 unit dibangun di jalan ling-

kungan dengan anggaran Rp765 juta. Sedangkan 61 tiang PJU dibangun di jalan kolektor untuk menunjang program penataan trotoar dengan anggaran Rp2 miliar.

"Saat ini pembangunan masih dalam proses persiapan pengadaan. Yang pasti sampai akhir tahun tiang PJU sudah harus terpasang semua," kata Ahmad.

Ahmad menambahkan, terkait pemasangan lampu smart system sepenuhnya kewenangan Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Sehingga pihaknya telah menganggarkan sesuai kebutuhan dan siap dipasang.

"Saya harap pembangunan PJU ini bisa memenuhi kebutuhan warga, terutama terkait penerangan jalan," ucapnya. ● yan

### PT GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk. PANGGLIAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Grahamas Citrawisata Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), selanjutnya disebut "Rapat", yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 8 Juni 2022  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Jl. Ampera Raya 18-20

#### Agenda RUPST:

- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

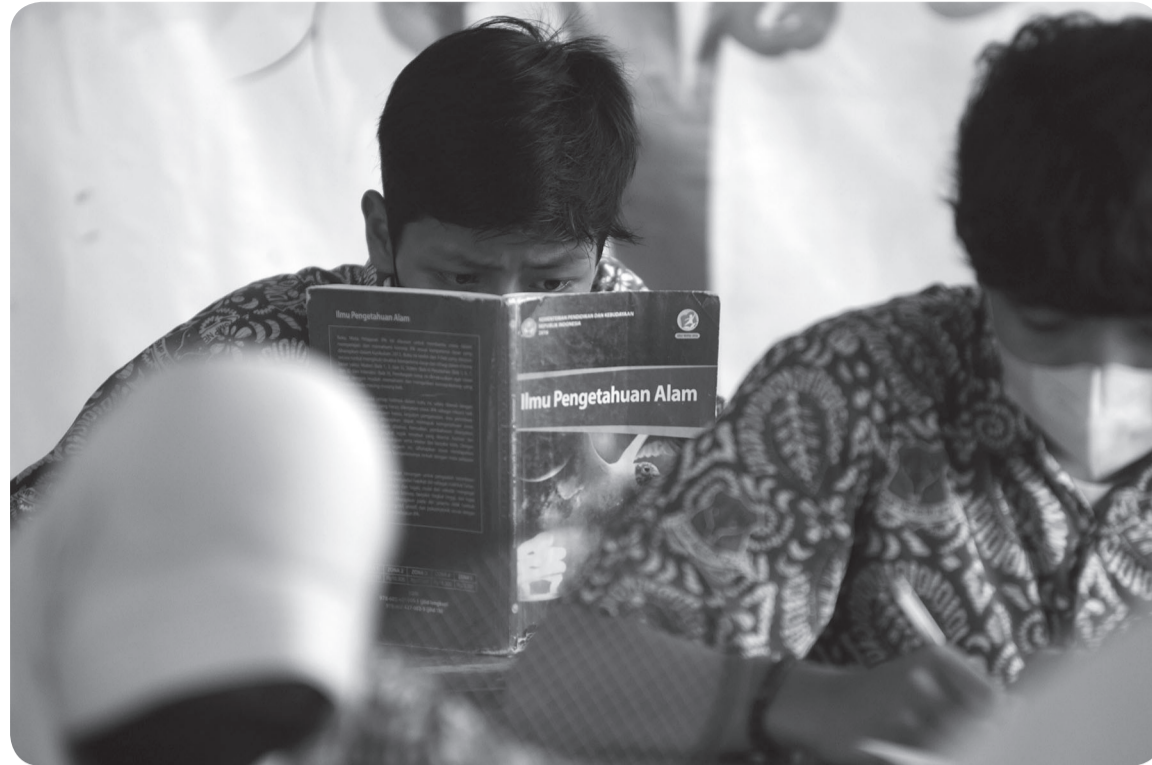
#### Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
- Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warak, maupun yang berada dalam penitipan kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2022.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar yang terakur, serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurus terakhir.

Jakarta, 13 Mei 2022  
PT Grahamas Citrawisata Tbk.  
Direksi

# 4 | Metropolis

FOTO/ANT



### KAJI PEMBELAJARAN DARING ANTISIPASI HEPATITIS AKUT

Sejumlah siswa mengikuti kegiatan belajar di SMPN 242 Jakarta, Kamis (12/5). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji proses pembelajaran secara daring guna mengantisipasi penyebaran penyakit hepatitis akut dimana telah ditemukan 21 kasus dugaan hepatitis akut di Ibu Kota.

# Anies: Pandemi Belum Berakhir, Masyarakat Jangan Abai

Saat pandemi masih berlangsung di Jakarta, penularan penyakit lain, hepatitis akut, juga diduga bertambah. Karenanya, seluruh masyarakat harus tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh di masa transisi ini.

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengumumkan perpanjangan PPKM Level 2 selama 14 hari kedepan, 10 Mei sampai 23 Mei. Dia mengingatkan, agar seluruh masyarakat bisa tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh di masa transisi ini.

"Insya Allah, sebentar lagi akan segera melewati pandemi dengan baik. Ingat pandemi belum berakhir, jangan abai," kata Anies dalam keterangan-

nya yang diterima di Jakarta, Kamis (12/5).

Saat pandemi masih berlangsung di Jakarta, penularan penyakit lain, hepatitis akut, juga diduga bertambah. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, DKI Jakarta saat ini sedang mendalami 21 kasus dugaan hepatitis akut misterius secara epidemiologi. Menurutnya, seluruh kasus tersebut merupakan warga domisili Jakarta. "Dari 21 kasus, 14 orang,

termasuk tiga yang meninggal, berusia kurang dari 16 tahun," kata Riza kepada awak media, Kamis (12/5).

Sementara tujuh orang lainnya, kata dia, berusia lebih dari 16 tahun dan masih dalam proses penyelesaian pemeriksaan. Menurut dia, tujuh orang berusia lebih dari 16 tahun itu tidak termasuk kriteria WHO sebagai kewaspadaan hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya.

Menurutnya, pemeriksaan hepatitis akan dilakukan secara lengkap dari jenis A hingga E. "Jadi semua kasus masih berstatus pending classification," ujarnya.

Ditanya keperluan untuk pembentukan satgas penyakit tersebut, Riza membantahnya. Menurut dia, Jakarta masih akan menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui

Kementerian Kesehatan.

### Minta PTM Diawasi

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad, meminta ada pengawasan dari Pemprov DKI Jakarta menindaklanjuti hepatitis akut. Dia menyebut, perlu ada surat edaran baru khusus PTM 100 persen yang mulai dilakukan.

"Harus siaga mencegah penularan di sekolah-sekolah yang mengadakan PTM 100 persen," kata Idris dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (12/5).

Menurut Idris, surat edaran tersebut perlu ditekankan pada langkah pencegahan dan evaluasi PTM 100 persen beberapa waktu terakhir. Idris meminta Pemprov DKI tidak menunggu kasus hepatitis akut tersebut bertambah pesat.

Idris mengatakan langkah-langkah tersebut ditekankan mengingat adanya lonjakan kasus khusus usia anak. Terlebih, saat gejala pada para anak itu menyebabkan kematian.

"Mereka adalah kelompok rentan, kita harus lindungi anak-anak kita dari ancaman ini," ujar Idris. ● yan

## Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Dilantik Oktober

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengungkapkan kriteria pengganti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies masa jabatannya akan habis pada tahun ini 2022.

Untuk itu, Pejabat (Pj) Gubernur yang akan menggantikan Anies bakal dilantik pada Oktober nanti. "Bulan Juli Aceh, Oktober DKI Jakarta," ujar Tito kepada wartawan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5).

Mantan Kapolri ini mengatakan, bahwa calon tiga nama akan diserahkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk 3 nama diajukan ke Pak Presiden. Sama yang nanti bulan Oktober (DKI Jakarta) sebulan sebelumnya lah September kita nanti akan sudah dapat nama, kita ajukan ke Bapak Presiden," ungkap Tito.

Diketahui 101 kepala daerah yang terdiri atas 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota akan habis masa jabatannya tahun 2022 ini. Dan pada hari

ini Tito resmi telah melantik pejabat (Pj) untuk menggantikan lima Gubernur.

Mereka yang digantikan hari ini yakni Gubernur Banten, Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie; Gubernur Kep. Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan; Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar Anwar; Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

Dan lima Pj yang menggantikannya adalah: Pj. Gubernur Banten Sekretaris Daerah Banten, Al Muktabar; Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamiluddin; Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. Pj. Gubernur Gorontalo Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer dan Pj. Gubernur Papua Barat adalah Deputy Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Komisar Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw. ● pp

### SOAL USULAN JALAN PROTOKOL DIKELOLA DKI SAAT IBU KOTA PINDAH

## Ariza: Pemprov DKI Siap

JAKARTA (IM) - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi mengusulkan agar jalan protokol yang dikelola pemerintah pusat diserahkan ke Pemprov DKI dengan adanya perpindahan ibu kota negara. Merespons usulan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku Pemprov DKI siap menerima usulan tersebut.

"Ya saya kira kalau itu nanti tentu ada aturan dan kebijakannya, Pemprov Jakarta ini aset-aset kami siap saja. Apa pun nanti yang menjadi kebijakan pemerintah pusat kita akan laksanakan," ucap Riza kepada wartawan, Kamis (12/5).

Dia mengatakan pemprov mengaku siap jika mendapat arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan jalan protokol tersebut. "Kalau ada pemerintah pusat yang menanyakan kebijakan Sudirman-Thamrin diserahkan pemeliharaan, pengelolannya kepada Pemprov kita akan laksanakan sebaik mungkin," imbuhnya.

"Memang di Indonesia kan jalan terbagi ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, jalan desa dan sebagainya, jalan swasta, jalan perumahan, masing-masing ada peruntukannya dan ada kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Kami akan laksanakan apapun itu," jelasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi mengusulkan agar 13 sungai dan jalan protokol yang dikelola pemerintah pusat diserahkan ke Pemprov DKI. Prasetyo mengatakan Pemprov DKI memiliki alat untuk mengelola sungai dan jalan, terlebih status Ibu Kota bakal pindah. "Ada 13 sungai di Jakarta, jalan protokol itu jalannya Pemerintah Pusat. Pertanyaannya adalah kalau itu jalan rusak yang disalahkan siapa? Pemerintah daerah, nah lebih baiknya, dengan adanya mau perpindahan ibu kota negara, serahkan saja kepada DKI," ujar Prasetyo kepada wartawan, Selasa (10/5) lalu.

Prasetyo meminta, khususnya kepada Kementerian PUPR, agar menyerahkan 13 sungai ataupun jalan protokol kepada Pemprov DKI. Ke-13 sungai yang dimaksud dan melintasi Jakarta adalah Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru

Barat, Mookkevert, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.

"Karena masalah di Jakarta cuma dua, macet dan banjir. Bagaimana cari solusinya? Jadi jangan bisalah salah-salahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini kan nggak bagus juga," ucapnya.

"Nah 13 kali itu diserahkan aja ke kita. Pada saat tahun baru juga yang di sisi Sentul City itu, saya pernah mengajukan itu. Saya bicara dengan Wakil Menteri di situ, serahkan saja Jakarta mengenai 13 sungai dan jalan protokol, pasti beres," sambungnya.

Prasetyo mengatakan salah satu jalan yang dimaksud adalah Jalan MH Thamrin menuju Sudirman.

"Jadi jangan dibuat kebijakan yang agak-agak benci gitu, to the point aja. Jadi kita nggak pusing main salah-salahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, itu aja kok, nggak ribet. Jadi Jakarta benar-benar kota bisnis, kota pertanggungjawabannya wilayah otonomi daerah dan membantu juga Pemerintah Pusat untuk konsentrasi IKN," katanya. ● yan



### PEMERIKSAAN HEWAN TERNAK DI JAKARTA

Dokter hewan memeriksa kesehatan hewan sapi di salah satu lokasi peternakan di Jakarta, Kamis (12/5). Pemeriksaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) setempat itu guna mencegah penyebaran wabah virus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang sudah merebak di sejumlah daerah.

## Antisipasi Krisis Air BPBD DKI Siapkan Air Baku dari Waduk

JAKARTA (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah menyiapkan air baku dari sejumlah waduk untuk mengantisipasi krisis air bersih saat memasuki musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Sumber Daya Air (SDA) dalam menyiapkan mobil untuk mendistribusikan air bersih.

"Pembangunan waduk juga untuk menyiapkan air baku, seperti dari Setu Babakan, Lebak Bulus, dan Mangga Bolong," kata Isnawa Adji saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin.

Isnawa menjelaskan, BPBD telah membentuk tim khusus yang sewaktu-waktu dapat diaktifkan jika kekeringan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Menurut dia, sumur resapan yang telah dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertujuan mengurangi debit air berlebih saat musim hujan. Namun juga untuk persediaan air saat kemarau.

Karena itu, BPBD

mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih, seperti mematikan keran jika tidak dipakai serta bijak dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga.

"Juga memastikan tidak adanya kebocoran pada peralatan pipa, kran dan penampungan serta berupaya menampung air hujan," kata dia.

BPBD DKI telah pula memetakan daerah yang berpotensi terjadi krisis air bersih. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kata dia, memang belum mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk wilayah yang lebih spesifik di Jakarta.

Namun jika merujuk pada peringatan dini kekeringan meteorologis yang pernah dikeluarkan BMKG pada 2019, ada 15 kecamatan yang masuk ke dalam daerah rawan terjadi kekeringan.

Yakni di Jakarta Pusat meliputi Menteng, Gambir, Kemayoran dan Tanah Abang. Kemudian di Jakarta Utara (Cilincing, Tanjung Priok, Koja, Kelapa Gading dan Penjaringan). Selain itu, Jakarta Selatan (Tebet, Pasar Minggu, Setiabudi) dan Jakarta Timur (Makasar, Pulogadung, Cipayang). ● yan